



**LAPORAN AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LAKIP )**

**Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Kabupaten Bangkalan  
TAHUN 2018**



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018.

Penyusunan LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2018.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, serta berguna bagi semua pihak.

Bangkalan, Januari 2019

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN BANGKALAN



Drs. MOHAMMAD FAHRI, M.Si  
NIP. 196211231983081002

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>		i
<b>Daftar Isi</b>		ii
<b>Daftar Tabel</b>		iii
<b>Daftar Gambar</b>		iv
<b>Daftar Lampiran</b>		v
<b>Ikhtisar Eksekutif</b>		vi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
	A. LATAR BELAKANG	2
	B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
	C. DASAR HUKUM	3
	D. GAMBARAN UMUM OPD	4
	E. TUGAS FUNGSI ORGANISASI	5
	F. SISTEMATIKA PENULISAN	6
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	8
	A. PERENCANAAN KINERJA	8
	B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018	9
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	12
	A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018	12
	B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018	23
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	25

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks Hubungan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2018	10
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran	13
Tabel 3.2	Perbandingan Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran	14
Tabel 3.3	Perbandingan Kinerja s.d Akhir Periode Renstra Pada Tujuan dan Sasaran	15
Tabel 3.4	Alokasi Anggaran per Sasaran	23
Tabel 3.5	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	24
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	25

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pencapaian Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran	13
Gambar 3.2	Perbandingan Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran	14
Gambar 3.3	Perbandingan Kinerja s.d Akhir Periode Renstra Pada Tujuan dan Sasaran	15

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Matrik Renstra  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Pemerintah Kabupaten Bangkalan
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

LAKIP BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 memfokuskan pada capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan yang secara utuh tercakup dalam 1 Tujuan dan 3 Sasaran Strategis (SS) yang menjadi kompetensi utama BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dengan dilengkapi oleh masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara keseluruhan, capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori “**Sangat Berhasil**” yaitu sebesar 100% tercapai. Adapun realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 6.482.296.522,00** atau **89,099%** persen dari pagu anggaran sebesar **Rp. 7.275.378.300,00**.

Namun demikian, keberhasilan yang dicapai BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang ada, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

Menyadari hal tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *Good Governance*. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan disusun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang juga merupakan instrument SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). LAKIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

LAKIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan di masa mendatang.

### **2. Tujuan**

Berdasarkan pertimbangan ini, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan 2018 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).
- b. Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi Masyarakat dan lingkungannya.
- c. Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi Pemerintah.

## **C. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan;
12. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor : 188.4/19/KPTS/433.201/2017 Tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018;

#### **D. GAMBARAN UMUM OPD**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan.

Dengan demikian untuk melaksanakan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan tersebut, maka dijabarkan sebagai berikut :

##### **1. Kedudukan**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **2. Tugas**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **E. ORGANISASI**

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan, antara lain meliputi :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
  - Sub Bagian Keuangan ;
  - Sub Bagian Umum.
3. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
  - Sub Bidang Pertanian dan Perikanan ;
  - Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Mikro ;
  - Sub Bidang Keuangan dan Pariwisata.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
  - Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan ;
  - Sub Bidang Kependudukan ;
  - Sub Bidang Pemerintahan.



terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah Celah Kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 adalah sebagai berikut ini :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan .

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN KINERJA

Sebagai konsekuensi logis dari dinamika perubahan lingkungan yang begitu cepat dan tuntutan masyarakat maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan perlu mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Untuk itu diperlukan visi sebagai cara pandang ke depan tentang kemana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan disusun berdasarkan kriteria - kriteria penulisan visi, yaitu singkat, jelas, mudah diingat, menarik dan menantang.

#### 1. VISI

Adapun Visi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas”**

#### 2. MISI

Adapun Misi untuk mewujudkan Visi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas”

#### 3. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan Misi dan merupakan “*result*” (hasil) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan

atau gambaran kondisi yang ingin dicapai dimasa datang.

Guna mewujudkan misi diatas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan, yaitu :

“Mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan yang efektif”.

#### 4. SASARAN

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan diatas, adalah sebagai berikut :

**Tujuan** dari Mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan yang efektif.

ditetapkan sasaran :

Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras dan efektif.

**Tabel 2.1**

Matriks Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan yang efektif	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras dan efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase usulan stakeholder yang diakomodir dalam dokumen perencanaan</li> <li>• Prosentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan</li> <li>• Prosentase ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis RPJMD</li> </ul>

#### B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahun 2018. Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	TARGET
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif, selaras dan Efektif	- Presentase usulan stakeholder yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	$(\sum \text{usulan Bid. Infracwil yang diakomodir} / \sum \text{usulan Bid. Infracwil yang masuk}) \times 100\%$	95%
			$(\sum \text{Program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD} / \sum \text{Program dalam RPJMD}) \times 100\%$	100%
		- Presentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	$(\sum \text{Program dalam RENSTRA yang sesuai dengan RPJMD} / \sum \text{Program dalam RPJMD}) \times 100\%$	97,02%
			$(\sum \text{Program dalam RENJA yang sesuai dengan RKPD} / \sum \text{Program dalam RKPD}) \times 100\%$	100%
		- Presentase ketercapaian indicator kinerja sasaran strategis RPJMD	$(\sum \text{Program dalam APBD yang sesuai dengan RKPD} / \sum \text{Program dalam RKPD}) \times 100\%$	84%
$(\sum \text{Program dalam RENJA yang sesuai dengan RENSTRA} / \sum \text{Program dalam RENSTRA}) \times 100\%$	76,32%			

	Program		Anggaran	Ket.
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	1.058.966.650,00	APBD
2.	Program Peningkatan Aparatur Disiplin	Rp.	37.450.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	9.547.050,00	APBD
4.	Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Rp.	1.665.561.950,00	APBD
5.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp.	48.922.700,00	APBD
6.	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Rp.	58.400.000,00	APBD
7.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	62.336.250,00	APBD
8.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Rp.	222.000.000,00	APBD
9.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	Rp.	610.000.000,00	APBD
10.	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp.	624.160.000,00	APBD
11.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	55.000.000,00	APBD
12.	Program Pemanfaatan Ruang	Rp.	300.000.000,00	APBD
13.	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	2.525.033.700,00	APBD
			Rp. 7.275.378.300,00	+

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil pengukuran kinerja terhadap 11 Program dan 43 kegiatan, menunjukkan bahwa secara umum BAPPEDA Kabupaten Bangkalan telah mencapai kinerja baik terkait perencanaan pembangunan daerah. Meski demikian masih terdapat beberapa indikator yang masih memiliki target sangat rendah. Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka penetapan indikator - indikator kinerja serta rencana pencapaiannya dilakukan sejak awal perencanaan program dan kegiatan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dari setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi yang dicapai oleh indikator kinerja tersebut, sehingga diketahui selisih kinerjanya (*performance gap*). Berdasarkan *performance gap* tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, diperhatikan prinsip - prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, maka telah kami tetapkan standart pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut :

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1.	85% sampai dengan 100 %	Sangat Berhasil
2.	70 % s/d kurang dari 85 %	Berhasil
3.	55 % s/d kurang dari 70 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

#### A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

##### **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan : Mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan yang efektif.

Sasaran : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras dan efektif.

## Pencapaian Kinerja

**Tabel 3.1** Pencapaian Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	% Capaian
Mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan yang efektif	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras, dan efektif	- Prosentase usulan stakeholder yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	95%	95,32%	95%
		- Prosentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	97,02%	97,46%	100%
		- Prosentase ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis RPJMD	84,00%	76,32%	80,16%

**Grafik 3.1** Pencapaian Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran



Pada sasaran ” Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang partisipatif, selaras dan efektif ” diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

1. Target pada indikator kinerja Prosentase usulan stakeholder yang diakomodir dalam dokumen perencanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 95 persen dengan realisasi sebesar 95,32 persen, sehingga target tersebut memiliki tingkat capaian sebesar 95 persen yang berada di kategori “Sangat Berhasil”.
2. Target pada indikator kinerja Prosentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan untuk tahun 2018 adalah sebesar 97,02 persen dengan realisasi sebesar 97,46 persen, sehingga target tersebut memiliki tingkat capaian sebesar 100 persen yang berada di kategori “Sangat Berhasil”.

3. Target pada indikator kinerja Prosentase ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis RPJMD untuk tahun 2018 adalah sebesar 84 persen dengan realisasi sebesar 76,32 persen, sehingga target tersebut memiliki tingkat capaian sebesar 80,16 persen yang berada di kategori “Berhasil”.

#### Perbandingan Kinerja

**Tabel 3.2** Perbandingan Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi		
				2016	2017	2018
Mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan yang efektif	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras, dan efektif	- Prosentase usulan stakeholder yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	95%	94,93%	94%	95,32%
		- Prosentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	97,02%	95,94%	97%	97,46%
		- Prosentase ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis RPJMD	84,00%	82,00%	87,5%	76,32%

**Grafik 3.2** Perbandingan Kinerja Pada Tujuan dan Sasaran



Secara keseluruhan, realisasi pada tahun 2018 lebih tinggi dari pada realisasi pada tahun-tahun sebelumnya.

1. Target pada indikator kinerja Prosentase usulan stakeholder yang diakomodir dalam dokumen perencanaan untuk tahun 2018 adalah sebesar 95 persen dengan realisasi sebesar 95,32 persen, dan tahun

2016 yang terealisasi sebesar 94,93 persen.

2. Target pada indikator kinerja Prosentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan untuk tahun 2018 adalah sebesar 97,02 persen dengan realisasi sebesar 97,46 persen, meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya terealisasi sebesar 97 persen.
3. Target pada indikator kinerja Prosentase ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis RPJMD untuk tahun 2018 adalah sebesar 84 persen dengan realisasi sebesar 76,32 persen, Menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 terealisasi sebesar 87,50 persen.

**Tabel 3.3** Perbandingan Kinerja s.d Akhir Periode Renstra Pada Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN 1	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir Renstra	Realisasi 2018	% Capaian
Mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan yang efektif	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras, dan efektif	- Prosentase usulan stakeholder yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	95%	95,32%	98,85%
		- Prosentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	97,02%	97,46%	99,92%
		- Prosentase ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis RPJMD	84,00%	76,32%	80,16%

**Grafik 3.3** Perbandingan Kinerja s.d Akhir Periode Renstra Pada Tujuan dan Sasaran



1. Indikator Kinerja Prosentase usulan stakeholder yang diakomodir dalam dokumen perencanaan mencapai 95,32 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA di tahun 2018 sebesar 95 persen.
2. Indikator Kinerja Prosentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan mencapai 97,46 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA di tahun 2018 sebesar 97,02 persen.
3. Indikator Kinerja Prosentase ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis RPJMD mencapai 76,32 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA di tahun 2018 sebesar 84 persen.

Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan outcome “Rata-rata Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan”, yang didukung dengan kegiatan:
  - Kegiatan penyusunan rancangan RPJMD, dengan keluaran berupa 3 dokumen RPJMD tekhnokratik dokumen rancanangan RPJMD 2018-2023 naskah akademis perda RPJMD.
  - Kegiatan Penyelenggaraan Munrenbang RPJMD, dengan keluaran berupa 2 Kegiatan Forum Konsultasi Publik Ranwa
  - Kegiatan penyusunan Rancangan RKPD, dengan keluaran berupa 2 dokumen. Dokumen rancangan RKPD 2019 dan Dokumen rancangan P-RKPD 2018
  - Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD, dengan keluaran berupa 4 kegiatan dan terlaksananya musrenbangcam, forum OPD, konsultasi public& musrenbang tingkat kabupaten / propinsi / nasional.
  - Kegiatan Penetapan RKPD, dengan keluaran berupa 2 dokumen Perbup tentang perubahan RKPD tahun 2018 dan RKPD tahun 2019.

- Kegiatan Pembuatan Feeder Aplikasi SIEPPD Terintegrasi e-finance sirenda, dengan keluaran berupa 1 Paket Aplikasi SIEPPD yang sudah terintegrasi dengan e-finance sirenda
  - Kegiatan Penetapan Renja OPD, dengan keluaran berupa 2 dokumen SK Bupati tentang Perubahan Renja OPD tahun 2018 dan Perubahan Renja OPD tahun 2019`.
  - Kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), dengan keluaran berupa 1 Dokumen LKPJ Kepala Daerah
  - Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Sistim Informasi Profil Daerah, dengan keluaran berupa 1 Dokumen Sistim Informasi Profil Daerah (SIPD) 2018
  - Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan dan Rencana Pembangunan Daerah, dengan keluaran berupa 4 Dokumen Laporan Hasil Pengendalian & evaluasi (DAK, pengukuran kinerja APBD&RENJA RKPD&PPK)
  - Kegiatan Fasilitasi Tim Fasilator Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, dengan keluaran Berupa 1 Dokumen Laporan Hasil Tim Fasilator Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan
  - Kegiatan Asistensi Penyusunan Renstra OPD, denga keluaran berupa 2 Dokumen Laporan Hasil verifikasi Indikator dan Tolak Ukur Kinerja
2. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) dengan outcome “Persentase usulan Stakeholder Bidang Perekonomian dan SDA yang diakomodir Dokumen Perencanaan” yang didukung dengan kegiatan:
- Kegiatan Koordinasi,Integrasi Singkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alama (SDA), dengan keluaran berupa 12 SKPD dan 18 Kecamatan dengan Pengendalian Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan, dengan keluaran berupa 3 Kecamatan dan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Sosurbang
  - Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, dengan keluaran berupa 1 Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
  - Kegiatan Data Dinamis Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Bangkalan, dengan keluaran berupa 2 Dokumen Data Dinamis Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Bangkalan
3. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan outcome “Persentase Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diakomodir dalam dokumen perencanaan” dan “Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia”, yang didukung dengan kegiatan:
- Kegiatan Perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dengan keluaran berupa 1 Dokumen Laporan hasil Perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal.
  - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi penanggulangan kemiskinan, dengan keluaran berupa 1 Dokumen laporan hasil Kegiatan penanggulangan kemiskinan.
  - Kegiatan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan bidang Pembangunan, dengan keluaran berupa 1 Dokumen laporan koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan.
  - Kegiatan Pengelolaan dan pengendalian PAMSIMAS, dengan keluaran berupa 75% Peserta Sosialisasi PAMSIMAS.

- Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dengan keluaran berupa 1 dokumen Laporan Fasilitasi dan Evaluasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
  - Kegiatan Indikator Sosial Budaya Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, dengan keluaran berupa 1 Dokumen Indikator Sosial Budaya Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia
  - Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia, dengan keluaran berupa 1 Dokumen Indeks Pembangunan Gender Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia
4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan outcome “Persentase usulan stakeholder Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang diakomodir dalam dokumen perencanaan” dan “Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan”, yang didukung dengan kegiatan:
- Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan, dengan keluaran berupa 1 Dokumen laporan hasil koordinasi dan Sosialisasi Pengendalian dan Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan.
  - Kegiatan Koordinasi Integrasi, Singkronisasi dan Sinergi perencanaan Pembangunan bidang infrastruktur dan Kewilayahan, dengan keluaran berupa 1 Dokumen laporan hasil Koordinasi dan Perencanaan Bidang Infrastruktur.
  - Penyusunan Dokumen kajian lingkungan hidup strategis RPJMD (KLHS-RPJMD), dengan keluaran berupa 1 Dokumen KLHS-RPJMD 2018 - 2022
  - Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Perumahan Permukiman dan Webgis, dengan keluaran berupa 2 Dokumen Neraca Lahan Perumahan, Permukiman dan Webgis.
  - Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, dengan keluaran berupa 1 Dokumen dan Terlaksananya Fasilitasi

- penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman.
- Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Sampah Perkotaan, dengan keluaran berupa 1 Dokumen RPSP IKK Bangkalan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan outcome “Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Layak Fungsi”, yang didukung dengan kegiatan:
- Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan keluaran berupa 68 Unit Pengadaan Notebook, Mesin penghancur kertas, Computer PC, Sound, Korden, Wifi, Tripot, Mesin checklock, Printer, Meja kerja non structural, Kabel konektor, LCD Proyektor, AC.
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan outcome “Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur Layak Fungsi” yang Didukung dengan Kegiatan :
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya, dengan keluaran berupa Pakaian Olah Raga dan Pakaian Batik Aparatur Bappeda Meliputi 81 Orang
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan outcome “Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang diselesaikan”, yang didukung dengan kegiatan:
- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, dengan keluaran berupa 1 Dokumen dan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD.
  - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan keluaran Berupa 1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun PD.
8. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja, dengan outcome “Persentase Ketercapaian Kinerja Satuan Unit Kerja” yang didukung dengan kegiatan:
- Kegiatan Penunjang operasional OPD, dengan keluaran Berupa terpenuhinya penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi

dalam 12 bulan.

- Kegiatan Fasilitasi Peringatan Hari Jadi Bangkalan, dengan keluaran berupa 1 Kegiatan Peringatan Hari Jadi Bangkalan.
  - Kegiatan Penyusunan Renstra OPD, dengan keluaran Berupa 1 Dokumen Renstra Bappeda Tahun 2018 - 2023.
  - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Renja OPD, dengan keluaran berupa 2 dokumen Renja Bappeda Tahun 2019 dan Perubahan Renja Tahun 2018.
9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan outcome "Prosentase Ketercapaian Kinerja Satuan Unit Kerja", yang didukung dengan Kegiatan:
- Kegiatan Maintenance Website dengan keluaran berupa Keamanan Server Pengumpulan Data dan Update Interface Website dalam 1 Kegiatan
10. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai " Prosentase Pelaksanaan Monev DBHCHT yang didukung dengan kegiatan :
- Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai, dengan keluaran berupa 1 Dokumen Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT
11. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Outcome "Persentase SDM Perencanaan OPD yang Mengikuti Bimtek /Pelatihan Tentang Perencanaan" yang didukung dengan kegiatan :
- Kegiatan Penguatan Perencanaan, dengan Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dikerjakan dengan 1 kegiatan
12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan outcome "Prosentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RT RW" yang didukung dengan kegiatan :
- Kegiatan dan Pembentukan Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah ,dengan keluaran berupa 1 Dokumen dan

Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

13. Program Pemanfaatan Ruang dengan outcome "Prosentase Ketersediaannya Peta Dasar Berbasis Geospasial" yang didukung dengan kegiatan :

- Kegiatan Penyusunan Peta Berbasis Geospasial dan Foto Udara, dengan keluaran berupa 4 Dokumen Peta Dasar Skali 1-5.000 dan Foto Udara Kawasan.

### **Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja**

Secara umum hasil capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa indikator yang memiliki target kecil dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun-tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 adalah:

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, sehingga target kinerja telah terealisasi.
- b. Tersedianya dana yang mencukupi untuk melaksanakan tupoksi.
- c. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

- d. Adanya sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas.
  - e. Adanya kerjasama yang baik antar bagian dalam organisasi.
  - f. Sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana.
2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau hambatan yang ditemui di BAPPEDA Kabupaten Bangkalan diantaranya kurangnya kompetensi SDM perencana dan keterbatasan data sehingga ketercapaian kinerja menjadi sangat kecil.

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang ditetapkan, BAPPEDA Kabupaten Bangkalan mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2018.

**Tabel 3.4** Alokasi Anggaran per Sasaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	%ANGGARAN
Mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan yang efektif	Prosentase usulan stakeholder yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	1.811.160.000	93,18%
	Prosentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan		
	Prosentase ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis RPJMD	2.525.033.700	84,56%

Dari pagu belanja Tahun Anggaran 2018, anggaran yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp. 6.842.296.522,00 atau 89,10 persen.

**Tabel 3.5** Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Mewujudkan manajemen perencanaan pembangunan yang efektif	Prosentase usulan stakeholder yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	98%	93,18%	2,12
	Prosentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	100%		
	Prosentase ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis RPJMD	100%	84,56%	1.18

Tingkat efisiensi dihitung melalui rumus (Nasoetion, 2011):

$$E = \frac{O}{I};$$

E = Efisiensi

O = Output

I = Input

Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika output yang dihasilkan lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai. Output dalam hal ini adalah prosentase capaian kinerja, sedangkan inputnya adalah prosentase penyerapan anggaran.

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, selaras dan efektif	Prosentase usulan stakeholder yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	95%	95,32%	95,16%	1.811.160.000,-	1.687.651.045,-	93,83%
	Prosentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan	97,02%	97,46%	97,24%			
	Prosentase ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis RPJMD	84%	76,32%	80,16%	2.525.033.700,-	2.135.064.286	84,56%

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang perencanaan pembangunan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Bangkalan. Di masa mendatang BAPPEDA Kabupaten Bangkalan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Bangkalan. BAPPEDA Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu penyangga utama birokrasi telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud birokrasi yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada kebutuhan rakyat.

Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang BAPPEDA Kabupaten Bangkalan akan melakukan berbagai langkah koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk

mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi BAPPEDA Kabupaten Bangkalan, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.